

BAB 1

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan teori

1.1.1 Teori Ekonomi Publik

Menurut Guritno (2002;2), ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat,pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Dengan demikian mengenai teori ekonomi publik pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus menekankan kebijakan apa yang sesuai dalam menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat yang ada di suatu daerah salah satunya pendapatan asli daerah sebagai tenaga dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Pada saat PAD tinggi maka pemerintah dapat lebih mudah untuk melakukan pembangunan baik insfratuktur maupun kepentingan lainnya yang menyebabkan masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga output yang dihasilkan masyarakat tinggi yang dapat meningkatkan pendapatannya.

1.1.2 Teori Pendapatan

Teori pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1993 : 258).

Menurut Dombush (1997:27) menjelaskan bahwa dalam ekonomi makro terdapat tiga unsur yakni output, pendapatan dan pengeluaran. Output pemerintah menurut Mangkoesoebroto (2010:178) pemerintah menyimpan barang dan jasa untuk kebutuhan umum yang ditentukan oleh besaran jumlah pajak dari masyarakat. Sedangkan arti pendapatan dalam suatu daerah menurut Khusaini (2006:215-206) merupakan pendapatan yang memprioritaskan penerimaan modal dana tambahan dalam rentang waktu anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu melakukan pembayaran kembali.

Pendapatan daerah telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai pengertian mengenai pendapatan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan yang dimiliki daerah dan pendapatan daerah tersebut menjadi kas daerah sebagai kekayaan yang dimiliki daerah dan digunakan untuk keperluan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Tabel 2.1.1

Komponen-Komponen Penerimaan Daerah

| No | Penerimaan |
|----|--|
| 1 | <p>Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1) PAD<ul style="list-style-type: none">• Pajak Daerah• Retribusi Daerah• Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan• Lain-lain PAD yang Sah2) Dana Perimbangan<ul style="list-style-type: none">• Dana Alokasi Khusus• Dana Alokasi Umum3) Lain-lain Pendapatan yang Sah4) Pembiayaan Daerah |

Sumber : BPS. Penerimaan dan Pengeluaran (diolah)

Penerimaan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki suatu daerah dari berbagai sumber baik dari kekayaan daerah maupun dana dari pemerintah pusat sebagai suatu kekayaan yang berhak dialokasikan oleh pemerintah daerah, salah satu alokasinya membiayai semua pelayanan daerah dan pembangunan daerah demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sehingga menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

1.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu keuangan yang diterima pemerintah daerah dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dimanfaatkan sebagai modal dalam membiayai pelayanan dan pembangunan pemerintahan daerah, dengan adanya

modal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Halim Abdul & Mujib Ibnu (2009) menjelaskan, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan UU peraturan daerah.

Peranan PAD sebagai modal dalam pembangunan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah apalagi setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa kemandirian suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan harus bersumber paling tinggi dari pendapatan asli daerah dan meminimalkan dari keuangan pusat, dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menggali semua potensi yang memberikan kontribusi terhadap PAD.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995:20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting semenjak disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah yaitu pemerintah daerah mempunyai suatu tanggung jawab agar pelaksanaan otonomi daerah

menjadi maksimal, sehingga harus mampu menggali semua potensi sumber-sumber PAD supaya nilai PAD menjadi tinggi dan ketergantungan terhadap keuangan pemerintah pusat dapat seminimal mungkin.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjadi perantara untuk meningkatkan suatu kesejahteraan rakyat, sehingga menjadi dasar dan tanggung jawab dalam peningkatan nilai PAD karena sebagai anggaran yang ditetapkan untuk memenuhi hajat masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus meninjau bagaimana cara untuk meningkatkan PAD yang merupakan instrumen dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar,

tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

4. lain-lain PAD yang sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (b) Jasa giro (c) Pendapatan bunga (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai penerimaan yang diterima daerah sebagai dampak dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber PAD yang memberikan kontribusi yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi hak daerah.

Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan hasil usaha yang dilakukan pemerintah semenjak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah karena pemerintah daerah tersebut telah mempunyai kemampuan dalam membiayai pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bukan hanya itu bahwa pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan mengandalkan semua penerimaan PAD, sehingga PAD harus memiliki nilai yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PAD dalam penelitian ini yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan investasi.

1.1.4 Hubungan PDRB Atas Harga Konstan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemajuan pertumbuhan daerah menjadi cita-cita pemimpin daerah salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan Produk Domestik Bruto. Sedangkan pada tingkat wilayah daerah seperti Provinsi dan Kabupaten atau Kota menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto, secara teori dapat dijelaskan merupakan bagian dari Produk Domestik Bruto. Sehingga apabila terjadi perubahan angka PDB akan mempengaruhi perolehan dari Produk Domestik Regional Bruto dan sebaliknya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan menjumlahkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi pada regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS,2016). Melalui PDRB setiap unit yang dihasilkan oleh masyarakat daerah tertentu dapat diketahui sehingga peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat dapat terukur.

Sedangkan menurut Sukirno, Produk Domestik Regional Bruto adalah total jumlah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu, dimana menekankan pada faktor produksi yang akan digunakan. PDRB dapat memproyeksikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Dalam menghitung besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang didapat pada suatu wilayah, dapat menggunakan dua metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan perhitungan yang mengaitkan data daerah secara langsung

mengenai kondisi daerah tersebut dan data yang digali dari sumber data yang ada didaerahnya sendiri. Penggunaan metode langsung ini mempunyai tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendapatan pengeluaran. Adapun ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut.

Pendekatan produksi ini adalah perhitungan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan dari seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut yang dikurangi dengan biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Sektor produksi tersebut dikelompokkan menjadi sebelas sektor atau lapangan usaha yaitu; pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

Pendekatan pengeluaran merupakan nilai produksi yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, investasi oleh penanam modal, dan belanja pemerintah, serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dinyatakan dengan:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Adapun komponen-komponen dari pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran meliputi: Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (C), pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasi (I), konsumsi pemerintah (G), ekspor neto (X-M). Dimana ekspor neto ini harus dikurangi dengan nilai impor terlebih dahulu sehingga menghasilkan ekspor neto. Sehingga dari

penjumlahan komponen-komponen tersebut akan didapat besarnya pendapatan nasional yang mencerminkan PDB dan PDRB di setiap wilayah.

Pendekatan dari segi pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima yang merupakan nilai tambah dari faktor produksi yang ikut terlibat dalam proses produksi suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Perhitungan dari pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut:

$$Y = r + i + p + w$$

Adapun balas jasa sektor produksi dari perhitungan tersebut terdiri dari: upah dan gaji (r), pendapatan bunga (i), pendapatan bersih dari sewa (w), dan pendapatan dari keuntungan dan usaha perorangan (p). Faktor-faktor produksi yang termasuk dalam pendekatan pendapatan yaitu tenaga kerja, modal, tanah dan keahlian atau kewirausahaan. Adapun cara yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan metode tidak langsung, yaitu dengan cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas menuju bagian wilayah masing-masing. Alokator-alokator yang digunakan dalam metode tidak langsung ini adalah:

- a. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor maupun bagian dari sektor tersebut pada wilayah yang dialokasikan
- b. Jumlah produksi fisik
- c. Jumlah tenaga kerja, dan
- d. Penduduk

Dari keempat indikator diatas dalam penggunaannya dapat diambil salah satu atau dapat juga mengkombinasikan dari beberapa alokator sehingga dapat diperhitungkan berapa

besar persentase bagian dari masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor yang diterima.

Pada suatu daerah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi memerlukan suatu indikator agar besarnya tingkat kepesatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat diketahui, dimana dengan indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan negara. Salah satunya indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penyajian Produk Domestik Regional Bruto menurut sektor lapangan usaha, dapat disajikan ke dalam dua bentuk, yakni PDRB atas Dasar Harga Konstan dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku. Adapun PDRB atas Dasar Harga Konstan ialah menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang terlepas dari adanya unsur inflasi karena dalam perhitungannya menggunakan harga satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sedangkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku didalamnya masih memakai unsur inflasi. Penggunaan PDRB atas Dasar Harga Konstan lebih menyajikan hasil peningkatan maupun penurunan PDRB yang konkrit, karena tidak memakai harga saat adanya inflasi yang berlangsung. Sehingga memakai perhitungan dengan atas Dasar Harga Konstan tidak akan menyesatkan bagi perekonomian wilayah.

Adapun hubungan antara PDRB dengan pendapatan asli daerah merupakan sebuah hubungan yang fungsional, hal ini dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD seperti yang dikatakan oleh Tarigan. Dimana pada saat PDRB meningkat maka akan dapat menambahkan penerimaan pendapatan daerah guna membiayai program-program pembangunan pemerintah daerah yang selanjutnya dapat memicu adanya dorongan terhadap peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga produktivitas masyarakat akan meningkat. Angka produktivitas masyarakat tinggi maka pendapatan

masyarakat juga akan meningkat yang mengakibatkan semakin tinggi kemampuan orang tersebut dalam membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Secara konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besarnya PDRB yang diperoleh maka semakin besar pula potensi daerah dalam menerima pendapatan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan dari proyeksi angka PDRB, maka itu menandakan akan mendorong banyaknya perolehan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan sebagai biaya pembangunan daerah.

1.1.5 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi menurut pemikiran Adam Smith disebabkan karena adanya kemajuan teknologi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pembentukan modal yang terjadi akan berpengaruh pada kemajuan teknologi, sehingga dengan adanya akumulasi modal akan ada pembagian kerja sehingga penduduk melahirkan produktivitas tenaga-tenaga kerja. Dengan begitu akan mendorong adanya investasi dan persediaan modal yang akan mendorong perkembangan teknologi dan akan berpengaruh pada pembangunan

Penduduk merupakan penggerak utama dari sumber daya yang ada, dimana akan memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk adalah jumlah dari orang-orang yang sah mendiami suatu daerah atau Negara, yang mana harus mentaati ketentuan peraturan dari daerah tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan akan tetapi memiliki tujuan untuk menetap.

Dengan demikian besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah (Population Reference Bureau (PRB), 2011).

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi ancaman bagi pembangunan ekonomi. Setiap daerah memiliki target perencanaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerahnya. Dimana pertumbuhan penduduk akan dimanfaatkan untuk memenuhi terwujudnya target tersebut dengan meningkatkan kapasitas dari penduduk agar dapat menghasilkan hasil produksi yang baik. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah tinggi maka daerah tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan tingginya kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan suatu penambahan atau pengurangan penduduk yang tinggal disuatu daerah yang terbentuk akibat dari proses keseimbangan yang berubah-ubah dimana dapat mengurangi atau menambah jumlah penduduk, keseimbangan tersebut terjadi karena adanya tiga komponen yaitu

1. Fertilitas (kelahiran)

Dalam istilah demografi, fertilitas dimaksudkan sebagai hasil dari reproduksi dari seorang atau sekelompok wanita. Fertilitas berkaitan dengan jumlah bayi lahir yang mempunyai tanda-tanda kehidupan dari seorang wanita yang sudah menikah dan wanita tersebut dalam keadaan subur atau mampu menghasilkan keturunan. Fertilitas merupakan kelahiran yang menyebabkan perubahan penduduk, sehingga adanya fertilitas yang tinggi akan dapat menambah jumlah penduduk di suatu daerah.

2. Mortalitas (kematian)

Mortalitas merupakan salah satu diantara tiga komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk yaitu mengurangi jumlah penduduk. Data tentang kematian dari jumlah penduduk sangat penting bagi pemerintah maupun bagi pihak swasta terutama yang bergelut dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian ini sangat penting untuk menggambarkan pertumbuhan penduduk guna perancangan

pembangunan yang akan berpengaruh pada kepentingan masyarakat itu sendiri kematian juga digunakan untuk pembuatan peraturan dan program-program pemerintah dalam kebijakan penduduk.

3. Migrasi

Faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi. Migrasi diartikan sebagai berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik cakupan nasional maupun internasional dengan tujuan untuk menetap. Migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah dalam masalah kepadatan dan tidak meratanya distribusi penduduk. Migrasi dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah. Sehingga dengan adanya migrasi jumlah penduduk akan berimbang, akan tetapi berbeda halnya dengan migrasi penduduk karena pengungsian sementara.

Dalam perekonomian suatu daerah, apabila besarnya jumlah penduduk diimbangi dengan kesempatan kerja dan kemajuan teknologi yang tinggi, serta perekonomian yang stabil akan memacu adanya pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, apabila aktivitas perekonomian masyarakat meningkat dan disertai dibangunnya pusat-pusat pelayanan masyarakat, maka hal ini akan mendorong peningkatan dalam perolehan pendapatan asli daerah. Dan juga bila pelayanan masyarakat sudah terpenuhi, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan terlaksana, sehingga hasil pajak yang terkumpul akan menjadi pendapatan asli daerah.

1.1.6 Hubungan Investasi (PMA) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan perlengkapan yang dilakukan oleh instansi atau penanam modal dengan tujuan meningkatkan hasil output dari suatu produksi yang tersedia pada perekonomian baik investasi dalam negeri maupun asing.

Peningkatan investasi akan memberikan suatu dampak yang positif dimana akan meningkatkan suatu kesempatan kerja karena banyaknya produksi yang terus dihasilkan sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penanam modal asing merupakan suatu kegiatan menanam modal untuk kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun gabungan dengan modal dalam negeri.

Pengertian PMA dari tinjauan dan pembahasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal dan kredit luar negeri :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan untuk ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Melalui investasi asing banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu daerah atau negara yaitu dikelolanya secara maksimal kekayaan sumber daya alam, banyaknya kesempatan kerja tercipta karena banyak perusahaan industri barang atau jasa yang didirikan yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak oleh masyarakat yang akan mendorong pada peningkatan pasilitas publik.

Tujuan dari PMA ini dijelaskan dalam Undang - Undang No. 25 pasal 3 ayat 2 Tahun 2007 antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan suatu bagian dari pendapatan daerah dimana besar kecilnya akan meningkatkan pendapatan daerah karena investasi merupakan suatu kondisi penambahan modal untuk meningkatkan suatu output produksi sehingga banyak sektor yang terkena manfaatnya mulai dari tersedianya lowongan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban terhadap pemerintah.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan acuan yang dimanfaatkan penulis dalam penulisan penelitian, karena melalui berbagai penelitian terdahulu dengan objek penelitian pendapatan asli daerah dengan permasalahan dan fenomena yang berbeda-beda yang terus untuk dipahami, sehingga melalui hal itu penulis mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian karena diperkaya akan teori, dasar pemikiran, cara pandang terhadap suatu fenomena dan cara bagaimana untuk menyelesaikannya, melalui hal ini dapat memunculkan suatu ketertarikan untuk meneliti suatu pendapatan asli daerah.

Dari penelitian terdahulu ini penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Berikut merupakan berbagai penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Identifikasi Masalah | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana (2011) | SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA | Seberapa besar pengaruh faktor-faktor jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat: | Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa jumlah industri, penduduk, dan pendapatan domestik bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). |
| 2 | Agus Endro Suwarno dan dan Suhartiningsih (2008) | EFEKTIVITAS EVALUASI POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH | Seberapa besar potensi dan kontribusi pajak daerah daerah terhadap PAD dan efektifitas sistem pungutan pajak | Dari analisis data dapat dilihat pajak daerah berpotensi dalam meningkatkan pendapatan, pajak lokal memberikan kontribusi signifikan |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | <p>dikabupaten sukoharjo</p> <p>-Dengan variabel indeventent : pajak</p> <p>- variabel devendent : PAD</p> | <p>bagi penerimaan daerah</p> |
| 3 | <p>Daniel Nababan dan Ivan Gumilar Sambas Putra (2018)</p> | <p>Analysis Contribution and Effectiveness of Local Taxes Toward Original Regional Income at Bandung City</p> | <p>Analysis Contribution and Effectiveness of Local Taxes Toward Original Regional Income at Bandung City</p> | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli pendapatan daerah</p> |
| 4 | <p>Widya Agussani dan Juliana Nasution (2023),</p> | <p>Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara</p> | <p>seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah khususnya di provinsi sumatera utara</p> | <p>Hasil analisis menunjukan bahwa pajak daerah atau retribusi daerah sangat berrelevansi erat, meskipun dalam hal ini pajak daerah lebih signifikan pengaruhnya</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah |
| 5 | Makdalena F Asmuruf, Vikie A. Rumate, dan George M.V. Kawung (2015) | PENGARUH PENDAPATAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SORONG | Menganalisis pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap PAD dengan – Variabel independet: pendapatan dan jumlah penduduk - Variabel dependent: PAD | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong, Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong. |
| 6 | Karlina (2022) | Analisis Pengaruh Investasi,PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah | Menganalisis pengaruh Investasi,PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menemukan Investasi,PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD |

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan dan memperoleh suatu penyelesaian dari permasalahan mengandung banyak persamaan dengan penilitian yang sedang dilakukan, diantaranya variabel terikat dari setiap jurnal yang dihasilkan oleh masing-masing peneliti merupakan pendapatan asli daerah (PAD) meskipun variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari masing-masing jurnal beragam tetapi ada beberapa penelitian yang menggunakan PDRB, jumlah penduduk, dan investasi sebagai variabel bebasnya.

Dari beberapa penelitian diatas juga banyak terdapat perbedaan yaitu mulai dari tempat penelitian kemudian ada yang menggunakan variabel bebas seperti jumlah industri yang dapat mempengaruhi PAD.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada beberapa penelitian terdahulu penulis merasa bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi merupakan variabel penting yang dapat mempengaruhi PAD secara proporsional.

1.3 Kerangka Pemikiran

Peranan pendapatan asli daerah yaitu sebagai modal terbesar dalam pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintah daerah, selain itu PAD juga merupakan suatu sikap kemandirian yang harus ditonjolkan oleh pemerintah daerah dimana harus meminimalkan ketergantungan terhadap keuangan pusat hal ini sesuai dengan sistem pemerintah Indonesia yang sekarang memberlakukan sistem desentralisasi yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Menurut Halim & Mujib (2009, h.1) ada 4 jenis desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi fiskal menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h.5) yaitu pendelegasian

tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah harus diupayakan secara optimal karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Karena melalui pembangunan daerah masyarakat akan lebih mudah dalam menggali semua potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mempunyai kemampuan dalam membayar kewajiban terhadap pemerintah.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu ciri terlaksananya otonomi daerah dimana telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan peraturan pemerintah di atas mestinya penargetan dan terlealisasinya nilai PAD tinggi bukan jadi masalah pada pemerintah daerah karena untuk memfasilitasi pembangunan daerah yang akan menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat daerah. Namun nyatanya ketimpangan pendapatan masyarakat masih tinggi khususnya di Jawa Barat yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar yang apabila dimanfaatkan akan berdampak pada peningkatan nilai PAD karena penduduk merupakan faktor produksi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Samuelson dan Nordhaus, (1993 : 258) pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran.

Pendapatan daerah telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Salah satu manfaat dari diketahuinya tingkat PDRB yaitu dapat melihat suatu perkembangan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan PDRB merupakan penjumlahan nilai semua sektor perekonomian daerah. Dengan demikian pada saat nilai PDRB tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat juga dalam keadaan baik yang menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat baik, apabila keadaan masyarakat baik hal ini akan mendorong masyarakat membayar kewajibannya terhadap pemerintah baik melakukan pembayaran pajak ataupun yang lainnya. Menurut Mankiw (2002:19) PDRB merupakan fungsi dari PAD yang mempunyai hubungan fungsional, dimana pada saat nilai PDRB tinggi maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak tinggi sehingga dapat meningkatkan PAD.

Penduduk mempunyai arti sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu daerah yang mampu memelihara dan melestarikan daerah baik yang bersifat alami maupun buatan karena sejatinya penduduk sebagai faktor produksi yang mampu menghasilkan output sehingga menjadi faktor utama dalam meningkatkan pembangunan, hal ini sesuai dengan teori adam smith yang mengemukakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi karena dengan adanya modal akan menarik investasi yang menjadikan suatu sarana dalam kemajuan

teknologi yang mendorong terjadinya pembangunan. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk sedikit maka tidak akan mampu dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, tetapi bila suatu daerah mempunyai penduduk banyak akan mengoptimalkan kekayaan daerah secara efisien, namun hasil yang diterima individu relatif kecil (Rosyidi,2002).

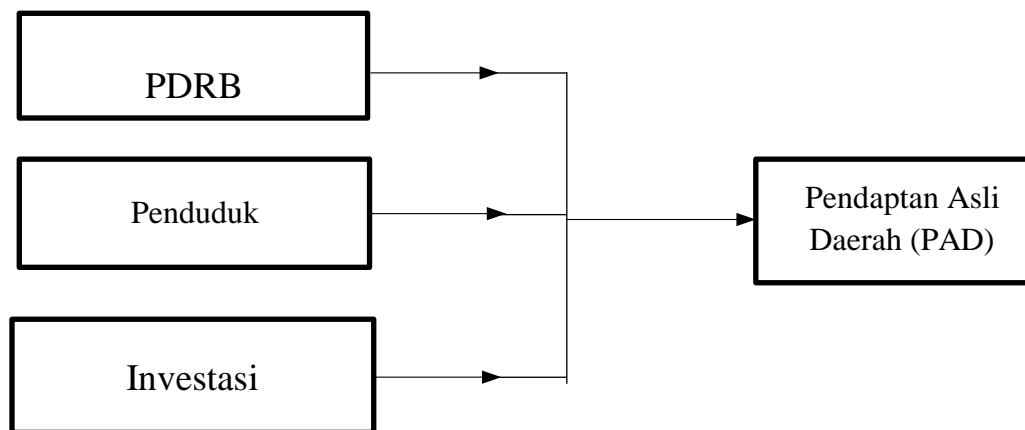
Menurut Marxist semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak juga produksi yang dihasilkan, banyaknya produksi yang dihasilkan maka semakin tinggi juga pendapatan suatu daerah. jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Penduduk merupakan sumber daya utama yang berpengaruh besar terhadap pembangunan di suatu wilayah. Menurut, Population Reference Bureau (PRB, 2011). Dengan demikian jumlah penduduk dapat mempengaruhi PAD akan tetapi tidak dapat mempengaruhinya secara proporsional (Atmaja,2007).

Dalam sistem perekonomian, investasi mampu menjadikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang efisien, karena melalui investasi pemerintah daerah dapat menerima banyak manfaat dari modal yang dikeluarkan oleh investor untuk melakukan kegiatan usaha di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi suatu barang dan jasa secara besar.

Investasi asing merupakan suatu pelimpahan modal yang diberikan pihak asing kepada pemerintah daerah untuk melakukan usaha sehingga sumber daya alam yang ada akan dimanfaatkan secara maksimal, bukan hanya itu pada saat PMA menghasilkan output yang besar maka permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja menjadi tinggi sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk menjadi tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Melalui PMA pemerintah daerah mempunyai banyak keuntungan yaitu salah satunya penerimaan pendapatan daerah akan meningkat, karena pada saat masyarakat mempunyai pendapatan yang tinggi, maka kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban terhadap pemerintah seperti pungutan pajak dan kewajiban lainnya akan menjadi ringan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran wajib terhadap pemerintah menjadi tinggi, yang mengakibatkan nilai pajak akan meningkat sebagai sumber yang dapat meningkatkan PAD.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan investasi terhadap PAD pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel bebas yang akan diteliti adalah PDRB, jumlah penduduk, dan investasi sedangkan variabel terikatnya PAD.



Gambar 2.1.1
Kerangka Penelitian

1.4 Hipotesis

Dari Permasalahan dan alur kerangka pemikiran maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. PDRB diduga berpengaruh terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Investasi diduga berpengaruh terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.